

TANTANGAN GLOBALISASI TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI PESANTREN

Ach. Syaiful A'la, M.Pd.I¹

Abstract

Ada tiga hal yang menjadi ciri khas dari adanya globalisasi, yakni makanan (*foot*), pakaian (*fashion*) dan hiburan (*fun*). Dampak dari terjadinya globalisasi sungguh merubah pola kehidupan manusia ketiga hal tersebut diatas, mulai dari gaya hidup yang semakin konsumtif, pragmatisme; segala sesuatu hanya seulu bisa diukur dengan materi termasuk dunia pendidikan yang selalu berorientasi kepada dunia kerja dan kepentingan pasar. Manusia sudah dikendalikan oleh mesin dan menjadi mesin-mesin oleh kepentingan tertentu. Ketika terjadi globalisasi dampaknya terhadap dunia pendidikan, maka tujuan pendidikan hanyalah untuk kerja, maka pada akhirnya yang terjadi komersialisasi pendidikan dalam segala tingkatan, mulai dari jenjang pendidikan paling rendah hingga perguruan tinggi. Bahkan bisa terjadi penodaan terhadap dunia pendidikan, seperti pemalsuan ijazah dan sebagainya. Menghadapi yang demikian, pendidikan Indonesia bukan berarti antipatif (eksklusif) terhadap globalisasi, tetapi juga harus mampu mendesain pendidikan kita (Indonesia) mampu tampil dan bersaing dalam pentas global sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam dunia kerja tanpa menghilangkan identitas dan karakter bangsa sendiri. Karena globalisasi kalau tidak disikapi dengan baik akan berdampak negatif, termasuk dampaknya dalam dunia pendidikan. Merespon yang demikian, pendidikan pesantren tetap penting digalakkan sebagai alternatif ditengah komersialisasi pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu agama (*al-din*) juga hendaknya membuka diri dengan model pendidikan modern agar santrinya (*out put*-nya) bisa tampil sebagai bentuk respon terhadap dunia global dengan mempunyai dasar (*basic*) pendidikan agama yang dibarengi dengan pendidikan akhlaq.

Keywords: *globalisasi, pendidikan Indonesia, pesantren.*

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan STI Al-Karimiyyah Sumenep. Kini sedang menyelesaikan Program Doktor (S3) IAIN Sunan Ampel Surabaya. Tulisannya telah dimuat diberbagai media lokal, nasional dan jurnal. Juga telah menerbitkan beberapa buku tentang wacana, pemikiran, dan hasil penelitian terkait isu-isu pendidikan Islam kontemporer. Email: achsyaiful@yahoo.com

Pendahuluan

Zaman globalisasi yang ditandai dengan arus informasi dan teknologi yang tak bendung lagi, menuntut kita untuk ikut ambil bagian peran agar tidak dicap sebagai negara-bangsa yang tertinggal oleh negara luar.² Kemajuan dan perbaikan dalam segala lini hendaknya segera diperbaiki dan memberikan layanan sebaik mungkin kepada masyarakat, termasuk akses layanan dalam pendidikan yang berkualitas.

Menghadapi zaman ini, dibutuhkan sebuah Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan mampu bersaing sesuai dengan zamannya. Kualitas SDM musthail terwujud tanpa adanya layanan pendidikan yang berkualitas pula terhadap generasi bangsa. Jika suatu Negara pendidikan maju, maka akan tersedia sumber daya manusia yang berkualitas pula, karena SDM yang berkualitas juga dicetak dari pendidikan yang berkualitas.³

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan.⁴ Banyak sekolah di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini mulai melakukan globalisasi dalam sistem pendidikan internal sekolah. Hal ini terlihat pada sekolah – sekolah yang dikenal dengan *bilingual school*, dengan diterapkannya bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin sebagai mata ajar wajib sekolah. Selain itu berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang membuka program kelas internasional. Globalisasi pendidikan dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar akan tenaga kerja berkualitas yang semakin ketat.

Persaingan untuk menciptakan negara yang kuat terutama di bidang ekonomi, sehingga dapat masuk dalam jajaran raksasa ekonomi dunia tentu saja sangat membutuhkan kombinasi antara kemampuan otak yang mumpuni disertai dengan keterampilan daya cipta yang tinggi. Salah satu kuncinya adalah globalisasi pendidikan yang dipadukan dengan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Selain itu hendaknya peningkatan kualitas pendidikan hendaknya selaras dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Tidak dapat kita pungkiri bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, untuk dapat menikmati pendidikan

² Imam Barnadib, *Pendidikan Perbandingan; Persekolahan dan Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Andi offset, 1987), h. 37. Baca pula pada: Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 122.

³ Ki Fudyartanta, *Membangun Kepribadian dan Watak Bangsa Indonesia yang Harmonis dan Integral* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 216.

⁴ Torsten Husen, *Masyarakat Belajar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 79.

dengan kualitas yang baik tadi tentu saja memerlukan biaya yang cukup besar. Tentu saja hal ini menjadi salah satu penyebab globalisasi pendidikan belum dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.

Arus globalisasi yang semakin pesat telah membuat jarak antar Negara seakan tak berarti lagi. Pada masa sekarang ini, tak sulit untuk anak nelayan terpencil mengetahui kejadian robohnya gedung WTC di Amerika Serikat dalam hitungan jam. Kemajuan teknologi yang semakin pesat sebagai dampak dari globalisasi ternyata juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan Indonesia. Home schooling, virtual learning dan program-program pendidikan import lainnya yang mulai diterapkan di Indonesia sebagai akibat dari cepatnya akses internet.

Globalisasi yang telah memberikan inspirasi-inspirasi baru tersebut untuk mengadopsi program-program pendidikan dari luar Indonesia. Belum lagi musim internasional yang akhir-akhir ini melanda Indonesia, Pengadaan sekolah-sekolah bertaraf internasional sedang booming digalakkan. Tidak hanya pada tingkat sekolah menengah bahkan taman kanak-kanakpun telah di program menjadi sekolah bertaraf internasional. Les bahasa inggris, mandarin, computer semua tersedia di sekolah. Fenomena tersebut tak lain, adalah akibat dari globalisasi.

Perubahan kurikulum pendidikan yang berkali-kali juga merupakan dampak dari pesatnya arus globalisasi. Pesatnya arus globalisasi menyebabkan pemerintah harus bergerak cepat mengubah kurikulum pendidikan yang lama yang dianggap ketinggalan jaman dengan kurikulum yang baru yang dianggap sesuai dan mampu menjawab tantangan global. Hal ini, dikarenakan dunia pendidikan adalah salah satu sektor penting dalam suatu Negara yang menopang berdirinya suatu Negara. Kehancuran dunia pendidikan merupakan langkah awal kehancuran suatu Negara. Kegagalan bangsa Indonesia di masa lampau mempertahankan kedaulatan negaranya, dikarenakan pendidikan rakyatnya yang lemah.

Oleh karena itu, hendaknya pemerintah yang dalam hal ini sebagai pengemban amanat rakyat, dapat bergerak cepat menemukan dan memperbaiki celah-celah yang dapat menyulut gejolak tersebut. Salah satunya dengan cara menjadikan pendidikan di Indonesia semakin murah atau bahkan gratis tapi bukan pendidikan yang murahan tanpa kualitas.⁵ Hal ini memang sudah dimulai di beberapa daerah di Indonesia yang menyediakan sekolah unggulan berkualitas yang bebas biaya. Namun hal tersebut baru berupa

⁵ Paulo Freire, dkk., *Menggugat Pendidikan; Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarkis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

kebijakan regional di daerah tertentu. Alangkah baiknya jika pemerintah pusat menerapkan kebijakan tersebut dalam skala nasional

Pendidikan Indonesia dalam Lintasan Sejarah

Pada masa ini, wajah pendidikan Indonesia lebih terlihat sebagai sosok yang memperjuangkan hak pendidikan. Hal ini dikarenakan pada saat masa penjajahan, sistem pendidikan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial adalah sistem pendidikan yang bersifat diskriminatif.⁶ Artinya hanya orang yang mampu dan orang mempunyai uang banyak saja yang boleh bersekolah, adapun orang yang melarat dari kalangan pribumi yang berasal dari golongan priyayi tidak dapat bersekolah.

Akibat dari adanya hal yang demikian itu oleh penjajah, bangsa Indonesia kehilangan rasa kritis dan kemandiriannya pada perkembangan selanjutnya. Kondisi demikian itu terus menjadi budaya dalam pendidikan kita di Indonesia. Sehingga yang berkembang dalam dunia pendidikan adalah tidak mencerdaskan dan membangun karakter bangsa juga terjadi diskriminasi dalam dunia pendidikan.⁷

Sebagai dampak dari adanya kolonialisme tersebut, juga bisa terjadi dua faktor terhadap pendidikan Indonesia abad sekarang. *Pertama*, terbukti bahwa orientasi pendidikan Indonesia bukanlah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau membangun karakter bangsa menuju manusia sempurna (manusia Indonesia seutuhnya, insan kamil). Tapi hanya berorientasi pada pemenuhan keterampilan dasar (*life skill*) untuk memenuhi kebutuhan teknis perusahaan asing (*multi national corporation*) yang sangat jelas pro barat dan kapitalis (neo liberal).

Kedua, swastanisasi pendidikan yang menjadikan sekolah lanjutan dan Perguruan Tinggi seperti perusahaan yang sah menarik biaya sebanyak-banyaknya dari siswa, menjadikan jumlah rakyat yang berkesempatan untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi menjadi lebih sedikit. Atau bagi rakyat miskin yang terlanjur memilih sekolah umum dan tidak bisa melanjutkan kuliah karena biaya yang melangit, terjebak menjadi pengangguran permanen dengan ijazah yang tidak bisa digunakan karena tidak kontekstual dengan kebutuhan pasar kerja.⁸ Ini artinya rakyat miskin tidak

⁶ Baca sejarah Panjang pendidikan Indonesia: Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 4-7, h. 9-11, 24-29, dan 31.

⁷ Ki Fudyartanta, *Membangun Kepribadian dan Watak Bangsa Indonesia yang Harmonis dan Integral* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 112 dan 127.

⁸ Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-Rusakan* (Yogyakarta: LKiS, 2007). Dalam dalam pengantarnya buku ini, v.

boleh sekolah sampai tinggi, padahal dari merekalah (mahasiswa dari rakyat biasa ini) seringkali ide-ide kritis dan revolusioner muncul.

Dalam hal ini pemerintah seperti menggunakan logika pedagang, menjual murah ijazah pendidikan dasar, tetapi di sisi lain menaikkan setinggi langit biaya sekolah menengah dan sekolah tinggi (universitas). Pendeknya, tidak untung dalam barang dagangan yang satu maka harus mengambil untung dalam barang dagangan yang lainnya.

Jika demikian pendidikan Indonesia saat ini sama saja dengan pendidikan kolonial yang berpihak pada kepentingan kapitalis. Rakyat di negeri ini terdiskriminasi untuk mendapatkan pengetahuan dan hanya terjebak menjadi serdadu-serdadu (kuli-kuli) pasar kapitalisme global. Sekolah lanjutan dan Perguruan Tinggi hanya bisa dinikmati oleh anak-anak orang kaya (borjuis; anak pejabat, pengusaha dan semacamnya) yang notabene juga merupakan instrumen pendukung kapitalisme.

Dengan demikian mentalitas dan nalar berpikir pelajar sekolah tinggi (mahasiswa) pun menjadi bermental kapitalis yang sangat jauh dari realitas sosial yang ada di sekitarnya bahkan terjebak untuk menjadi pengimitasi budaya barat secara lahir dan batin mulai dari ideologi, sikap hidup, kebiasaan dan simbol (ideologi materialistik, gaya hidup liberal, kebiasaan hedonis yang sepenuhnya barat, identifikasi simbolisme barat; rambut pirang, tato, tindik, permisifisme seksual, dll).

Globalisasi dan Tantangannya Bagi Pendidikan Indonesia

Menurut asal katanya, kata “globalisasi” diambil dari kata *global*, yang maknanya ialah *universal*. Achmad Suparman menyatakan *Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah* Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (*working definition*), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya.

Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama.

Secara umum, dampak dari adanya globalisasi menyebabkan dua faktor. *Pertama* adalah menggeser pola hidup masyarakat, dari agraris menjadi modern. Pola hidup yang ditandai dengan hidup konsumtif tak produktif. *Kedua*, kemajuan dalam sektor ekonomi. Terjadi pemerataan dalam bidang ekonomi, tetapi dalam konsep yang mempunyai modal tetap menjadi penguasa dalam konteks era globalisasi.⁹

Ketika globalisasi masuk dalam dunia pendidikan tentunya juga mempunyai dampak yang berbeda. Karena setiap sesuatu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, tergantung kepada bagaimana memandang hal dimaksud. Tetapi dalam pembahasan kali, kita mencoba membahas tentang dampak negatif terhadap kondisi dunia pendidikan Indonesia.

1. Komersialisasi Pendidikan

Era globalisasi mengancam kemurnian dalam pendidikan. Banyak didirikan sekolah-sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis. John Micklethwait menggambarkan sebuah kisah tentang persaingan bisnis yang mulai merambah dunia pendidikan dalam bukunya “masa depan sempurna” bahwa tibanya perusahaan pendidikan menandai pendekatan kembali ke masa depan. Salah satu ciri utamanya ialah semangat menguji murid ala Victoria yang bisa menyenangkan Mr. Gradgrind dalam karya Dickens. Perusahaan-perusahaan ini harus membuktikan bahwa mereka memberikan hasil, bukan hanya bagi murid, tapi juga pemegang saham.¹⁰

Kasus beberapa kampus di Indonesia yang masih belum hilang dari ingatan kita pada beberapa tahun yang lalu, tahun 2008 misalnya, merupakan bukti nyata kemerosotan nilai-nilai luhur dalam pendidikan. Gelar dapat diperoleh dengan harga murah. Tanpa harus mengikuti proses belajar mengajar yang sesuai prosedur. Munculnya sekolah-sekolah swasta elit yang bersaing menawarkan terobosan-terobosan baru dalam dunia pendidikan yang kebanyakan hanya sebagai media bisnis. Karena mereka menyodorkan terobosan dalam dunia pendidikan dengan imbalan uang yang tak sedikit jumlahnya.

2. Bahaya Dunia Maya

Dunia maya selain sebagai sarana untuk mengakses informasi dengan mudah juga dapat memberikan dampak negative bagi siswa. Terdapat pula, Aneka macam materi yang berpengaruh negative bertebaran di internet. Misalnya: pornografi, kebencian, rasisme,

⁹ H.A.R. Tilar, *Manifesto Pendidikan Nasional; Tinjauan dari Persepektif Postmodernisme dan Studi Kultural* (Jakarta: Kompas, 2005), 196.

¹⁰ www.indonesia-tercinta.dampak-globalisasi (8 Oktober 2011).

kejahatan, kekerasan, dan sejenisnya. Berita yang bersifat pelecehan seperti pedafolia, dan pelecehan seksual pun mudah diakses oleh siapa pun, termasuk siswa. Barang-barang seperti viagra, alkohol, narkoba banyak ditawarkan melalui internet. Contohnya, 6 Oktober 2009 lalu diberitakan salah seorang siswi SMA di Jawa Timur pergi meninggalkan sekolah demi menemui seorang lelaki yang dia kenal melalui situs pertemanan "facebook" dan yang lainnya. Hal ini sangat berbahaya pada proses belajar mengajar.

3. Ketergantungan

Mesin-mesin penggerak globalisasi seperti computer dan internet dapat menyebabkan kecanduan pada diri siswa ataupun guru. Sehingga guru ataupun siswa terkesan tak bersemangat dalam proses belajar mengajar tanpa bantuan alat-alat tersebut. Tidak ada kemandirian bagi pendidikan dan peserta untuk mengembangkan pembelajaran dengan teknologi sederhana. Maka ketika aktivitas pembelajaran dipusatkan terhadap teknologi yang namanya computer, proses kreasi dan kerajinan tangan pada peserta didik akan berkurang.¹¹

Pendidikan Islam Indonesia dalam Menyongsong Era Globalisasi

Adanya gelombang globalisasi seperti saat ini sebenarnya tidak perlu ditakuti dan dikhawatir oleh pendidikan kita di Indonesia. Hanya saja untuk menyambut zaman ini diperlukan sebuah SDM dan kebijakan-kebijakan baru dalam dunia pendidikan yang berorientasi kepada mempersiapkan generasi muda yang lebih terbaik, kritis dan mandiri.¹² Untuk mengantarkan insan paripurna tersebut, diperlukan adanya pola yang perlu diperhatikan oleh kita bangsa Indonesia, khususnya para pemegang kebijakan pendidikan di Indonesia.

Pertama, pendidikan harus dikelola dengan memperhatikan asas-asas keadilan. Hal ini penting karena selama Pemerintah Orde Baru, mungkin juga sampai sekarang ketimpangan dalam layanan pendidikan masih terjadi. Misalnya akses informasi dan bantuan terhadap jenjang pendidikan antara pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum dan pendidikan Islam.¹³

¹¹ Darmaningtyas, *Pendidikan yang Memiskinkan* Yogyakarta: Galang Press, 2009), 59.

¹² Baca: Hafid Abbas, *Menegakkan Dimensi HAM dalam Mreposisi Arah Pendidikan Nasional dalam Mengurai Benang Kusut Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 59-69.

¹³ Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif* (Yogyakarta: LKiS, 2008), 199. Baca juga di Moh. Rofiq, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2009) dan Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004).

Kedua, pendidikan Islam hendaknya menjauhkan dari segala bentuk ketertutupan. Pendidikan harus membuka diri dari adanya partisipasi masyarakat. Ditengah kebutuhan masyarakat yang bermacam-macam, plural, demokrasi, globalisasi, pendidikan betul mewadai kepentingan masyarakat. Kalau pendidikan dibelenggu seperti yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya, maka akan menimbulkan kerusuhan sosial yang mengancam terhadap keutuhan kita sebagai satu bangsa yang ikat dalam Pancasila.

Ketiga, pendidikan hendaknya ditangani secara profesional secara kelembagaan, kecamatan, kabupaten, propinsi dan pusat. Hal ini bisa dimulai dengan pola rekrutmen, penempatan dan pembinaannya dilakukan secara objektif. Hanya dengan profesionalisme diharapkan akan timbul kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

Keempat, pendidikan menjunjung tinggi semangat demokrasi. Mungkin yang dimaksud dengan pendidikan demokrasi adalah tidak adanya kebijakan sentralistik dalam pendidikan. Karena masing-masing daerah mempunyai kebijakan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan yang ada. Masing lembaga juga mempunyai karkater yang berbeda sesuai dengan visi dan misi yang dibangun sejak awal mendirikan sebuah lembaga pendidikan.

Kelima, pendidikan Islam hendaknya membuka diri untuk mendorong pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Dalam konteks ini pemerintah juga mempunyai peran dalam pemerataan dunia pendidikan, sehingga masyarakat yang miskin mempunyai akses dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan.

Keenam, budaya. Dalam era globalisasi budaya hendaknya tetap dipertahakan agar cirri khas dari bangsa itu masih melekat.

Ketujuh, pendidikan karakter. Pendidikan karakter bisa artikan dengan pendidikan akhlaq, pendidikan dengan memberikan materi-materi dengan menanamkan nilai-nilai etika pada diri siswa. Hal ini penting penting disaat Negara dalam kondisi krisis moral dan kepercayaan terhadap pemimpin yang semakin hilang. Maka dianggap paling mantap jika pendidikan karakter digalakkan dalam pendidikan.

Kedelapan, inovasi dan kreasi dalam pengelolaan pendidikan. Dalam era global pendidikan hendaknya melakukan trobosan baru kemajuan suatu pendidikan. Pembaharuan dan lain sebagainya merupakan tugas utama yang harus di dahulukan oleh pendidikan supaya pendidikan kita tidak tertinggal dan bisa mampu bersaing dengan tuntutan zaman.

Kesembilan, pendidikan orientasi pendidikan ke interprenership. Pendidikan adalah ajang kreativitas. Setiap anak didik akan ketahuan bakatnya pada saat berada dalam lingkungan pendidikan. Maka tugas guru/pendidikan

adalah mengetahui, mengangkat dan mengembangkan potensi masing-masing anak didik itu. Untuk kesana salah satunya adalah dengan cara merubah sistem pendidikan kita. Yang dulunya bersifat pengajaran (dari guru ke siswa) sekarang hendaknya pembelajaran berpusat pada siswa (student centre). Dengan demikian lembaga pendidikan akan menjadi pusat pengembangan kemampuan siswa untuk bisa mandiri dalam menghadapi kompetisi hidup.

Pendidikan Islam di Pesantren dalam Tantangan Global

Pada setiap kajian tentang Islam tradisional dan pendidikan Islam di bumi Nusantara, tidak bisa lepas dari pembahasan tentang peran pesantren dan kiai sebagai pemimpinnya. Sebab, sepanjang sejarah pertumbuhan Islam di Indonesia, pesantren dan kiai memiliki andil besar di dalamnya.

Pesantren adalah sebuah sebutan umum yang digunakan untuk menyebut nama sekolah Islam tradisional di Indonesia. Di berbagai daerah, penyebutan terhadap model pendidikan pesantren memiliki istilah yang bervariasi. Di Jawa dan Madura, misalnya, menggunakan istilah pondok untuk menyebut suatu lembaga pendidikan Islam dengan sistem dan model pesantren. Di Aceh digunakan kata *meunasah* dan di Sumatera Barat menggunakan istilah surau.¹⁴ Menariknya, seringkali muncul juga sebuah istilah/term yang berkembang di masyarakat lingkungan santri, bahwa pesantren selalu identik dengan sebutan penjara suci.¹⁵ Lembaga pendidikan

¹⁴ Greeg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKiS2007), 22-23. Mengenai istilah pesantren baca juga: Hanun Asrohah, *Pelembagaan Pesantren; Asal-Usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 1. Lihat pula dalam: Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 88.

¹⁵ Sepertinya kurang pas kalau lembaga pendidikan Islam seperti pesantren diberi label sebagai penjara suci. Tepatnya pesantren bukanlah sebuah penjara melainkan adalah "*laboratorium suci*". Terdapat perbedaan yang jauh antara penjara dengan laboratorium. Karena yang namanya penjara, walaupun memasukkan kata-kata "suci" diakhirnya, adalah tempat yang tidak enak, tembok penderitaan, membosankan tidak disukai banyak orang, layakny rumah sakit. Sementara pondok pesantren adalah yang sebaliknya. Pesantren adalah tempat yang sejuk, asyik, menyenangkan sebagai tempat belajar dan berkarya (*skill*) membuat apa saja didalamnya selama tidak menyimpang dari nilai dan norma yang telah digariskan oleh Agama. Kenapa lebih menggunakan istilah "laboratorium?" Laboratorium adalah sebuah tempat untuk diujikannya segala sesuatu. Begitu pula santri di masing-masing pondok pesantren. Semuanya bisa masuk untuk menguji kemampuan dan adanya bentuk pembinaan di dalamnya yang nantinya tetap tergantung kepada kemampuan (santri) sampai batas mana keahlian mereka. Yang demikian itu merupakan langkah awal sebagai bekal guna persiapan untuk terjun ketika akan pulang dan mengabdikan ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan tujuan berdirinya sebuah pesantren. *Walhasil*, dari tempat (laboratorium) itu, tidak sedikit kita jumpai out-putnya yang telah banyak ambil bagian peran di berbagai institusi birokrasi, LSM dan bahkan politik sekalipun adalah dari kelompok yang sering disebut dengan "kaum sarungan" alias santri. Baca: Abd. A'la, *Pembaruan Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, cet. I, 2006), ix. Baca pula pada: Ahmad Rofiq, *NU/Pesantren dan Tradisi Pluralisme dalam*

Islam seperti pesantren dan madrasah terus mengalami perkembangan (ber-evolusi dan inovasi) seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan ala pesantren.¹⁶ Maka tidak salah jika pesantren menjadi pendidikan alternatif ditengah keterpurukan kondisi bangsa dalam pembangunan karakter bangsa itu sendiri.¹⁷

Zamakhsyari Dhofier dari tulisannya melaporkan tentang ada pesantren dan kiai, bahwa adanya pondok pesantren terdiri dari beberapa komponen-komponen sebagai berikut kiai, santri, asrama, masjid, dan kitab kuning.¹⁸ Berkenaan dengan hal tersebut, Rofiq A, dkk melengkapi tentang adanya komponen pesantren, diantara: *Pertama*, pelaku pesantren yang terdiri dari kiai, ustadz, santri dan pengurus. *Kedua*, sarana perangkat keras: misalnya masjid, surau (langgar), rumah kiai, rumah ustadz, pondok, gedung, sekolah, dan asrama atau gedung-gedung lain untuk kegiatan pendidikan seperti perpustakaan, aula, kantor pengurus pesantren, kantor yayasan, kantor organisasi santri, kantor keamanan, gedung koperasi, gedung keterampilan (*skill*), dan gedung pelatihan. *Ketiga*, sarana perangkat lunak : misalnya kurikulum pondok pesantren, kitab atau buku-buku dan sumber belajar lainnya, cara atau metode belajar-mengajar (KBM) seperti metode *bandongan*, *sorogan*, *muhāwarah*, *mudhākarah*, hafalan, dan lainnya serta evaluasi belajar-mengajar.¹⁹

Eksistensi pesantren ditengah masyarakat dan kontribusinya terhadap pembangunan pendidikan bagi bangsa Indonesia merupakan konsekuensi logis yang tak dapat dipungkiri lagi. Ini artinya bahwa pendidikan pesantren yang terus membuka diri dengan segala kemajuan sudah barang tentu menghasilkan banyak alumni yang hingga kini tampil dalam pentas nasional mengisi semua lini aktivitas ke-Negara-an.

Sistem pendidikan pesantren hanya membekali santri dengan kecerdasan kognitif saja, melainkan juga dibekali dengan kecerdasan afektif dan psikomotorik sehingga membentuk kepribadian muslim yang beriman dan bertakwa, cerdas, cakap, terampil serta menjadi warga Negara yang baik.

Konteks Negara-Bangsa dalam Ahmad Suaedy, *Pergulatan Pesantren dan Demokrasi* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 209.

¹⁶ Untuk lebih jelasnya tentang sejarah pertumbuhan dan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia, lihat: Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007).

¹⁷ Babun Suharto, *Dari Pesantren Untuk Umat: Reinventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi* (Surabaya: Imtiyas, 2011), 99.

¹⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1982), 44-60.

¹⁹ Rofiq A, dkk., *Pemberdayaan Pesantren; Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, cet. i, 2005), 3-4.

Artinya, kebutuhan terhadap pendidikan yang menanamkan nilai-nilai seperti itu masih ditunggu dalam Negara Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran lembaga dan pengajaran pendidikan Islam yang berbentuk madrasah diniyah merupakan jawaban atas kebutuhan hasrat orang tua siswa sehingga bisa menyalurkan putra-putri untuk belajar pada jenjang Madrasah Diniyah Islamiyyah. Kalau lembaga pendidikan Islam tidak merespon dengan adanya perkembangan dan kemauan masyarakat, maka akan terjadi kesenjangan.²⁰ Kesenjangan inilah yang menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pendidikan. Untuk hal itu, lembaga pendidikan juga mampu mengubah model pendidikan disesuaikan dengan kemauan masyarakat. Hal ini juga menandakan bahwa pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan yang terbuka.²¹

Memasuki zaman globalisasi dan era reformasi saat ini, maka dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang cukup handal dan siap berkompetisi dalam banyak hal agar tidak terpinggirkan oleh bergulirnya perubahan zaman. Dalam situasi yang masih fluktuatif dan ancaman disintegrasi sosial yang mengarah ke gerakan etnonasionalisme, kita dihadapkan pada problem bagaimana menyiapkan rancang bangun yang operasional untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mendorong tumbuhnya demokrasi dan tersedianya sumber daya manusia yang dilandasi oleh iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disini, pemuda – santti yang ada di pesantren - sebagai salah satu generasi penerus perjuangan bangsa dituntut untuk turut pula mengambil bagian peran dalam berkompetisi dengan para tetangganya mencari pangsa pasar, dengan berani untuk lebih terbuka dan siap adu kualitas.

Kompetisi yang dapat dilakukan oleh anak muda adalah dengan turut pula ambil bagian, memposisikan diri dan membuktikan sebagai agent of change yang juga mampu mengakomodasi tuntutan di era globalisasi, yaitu mempersiapkan dirinya sebagai manusia yang tidak hanya bertakwa tapi juga berilmu, memiliki intelegensia yang cukup tinggi *plus* berahlakul karimah. Penciptaan *out put* seperti itulah peran pemuda dan mencari kesempatan yang lebih besar untuk mengawal bangsa Indonesia dalam menghadapi era globalisasi.

Jauh sebelum muncul istilah *Full Day School*, *Home Schooling* dan sebagainya, institusi keagamaan yang kita kenal dengan istilah “pesantren” ini sudah lama mulai sejak berdirinya menerapkan hal-hal semacam itu. Hanya

²⁰ Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 6.

²¹ Maksun, *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 31.

saja kita tidak sadar dan tidak pernah ada perhatian serius dari pemerintah untuk mengembangkan pendidikan ala pesantren khususnya di Jawa Timur yang tidak sedikit jumlah sekitar 5.226 pesantren (Kompas: 11/5/07).

Istilah yang sering diperbincangkan sejak beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya selalu identik dengan memperjuangkan kebenaran, keadilan, egalitarianisme, dan demokrasi. Artinya, perjuangan yang semacam ini secara faktual mengandung nilai-nilai universal – terlepas dari motivasi dan aktor-aktor – memang diproyeksikan untuk memperdayakan masyarakat, terutama yang hidup di strata terbawah yang sering menjadi “korba” dalam proses pembangunan bangsa.

Dari perspektif diatas, jelas bahwa setiap aktivitas (perjuangan) yang berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan orang lain (banyak orang), dapat dikategorikan sebagai “pemberdayaan masyarakat”. hanya saja, yang kemungkinan besar berbeda adalah cara dan pendekatannya, sesuai dengan *background* kehidupan aktornya (pelakunya). Tetapi, perbedaan yang seperti ini tidak menjadi masalah, yang terpenting aktivitas yang dilakukan benar-benar diupayakan untuk mengangkat nasib masyarakat (kaum tertindas).

Dalam konteks itulah, lalu bagaimana kepedulian pesantren sekarang ini dalam memperdayakan masyarakat, sebagai “institusi” keagamaan yang tumbuh sejak beberapa tahun yang silam? Apakah pesantren telah menunjukkan intensitasnya dalam persoalan ini, yang sesungguhnya dapat dijadikan medium untuk semakin memantapkan ketaqwaan kepada Allah SWT? Jika memang demikian, apakah bukti-bukti kongkritnya yang dapat meyakinkan kita tentang adanya pemberdayaan masyarakat di kalangan pesantren?

Secara jujur harus diakui, bahwa pesantren selama ini masih tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Dari abad keabad, pesantren masih memperlihatkan kemampuannya untuk membendung gempuran modernisasi yang telah terbukti menjungkirbalikkan spiritualitas manusia, baik secara individual maupun komonal. Kenyataan ini, tentu saja tidak dilepaskan dari sportifitas (kesalehan) dan karisma kiai sebagai *top leader* pesantren, serta sekaligus juga perjuangan yang mengendalikan teologi dan moral. Sehingga, pesantren sangat mudah untuk berintegrasi dengan masyarakat, yang dari dimensi sosio-ekonomi-politik telah mengalami kekalahan dan ketertindasan.

Karena itu, sangat beralasan jika kehadiran pesantren dimanapun saja berada, benar-benar mendapat *respons* yang positif dari masyarakat. Respon ini dapat dijadikan suatu indikasi, bahwa pesantren – sejak awal berdirinya – sebenarnya telah banyak terlibat secara aktif konstruktif dalam proses

pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan kemampuan dan versi pesantren itu sendiri.

Peran pesantren misalnya dibidang spiritual, sampai sekarang ternyata masih belum bisa digantikan oleh lembaga-lembaga pendidikan lain. Dengan bermodal keikhlasan dan keteladanan, kiai (pesantren) telah menunjukkan keberhasilannya dalam mentransfer nilai-nilai relegius kepada santrinya, dan juga bahkan kepada masyarakat. Melalui cara ini kemudian lahirlah santri yang bermoral, tegar dan mampu menghindarkan diri dari “cengkraman” status formal – semisal pegawai negeri dan pekerjaan kantor, legeslatif dan eksekutif – yang telah menghegemoni mayoritas kaum terpelajar di bumi pertiwi saat ini. Saya kira tidak perlu ikut pendidikan kesetaraan seperti paker A, B, dan C (Kompas:11/5).

Dengan kata lain, pengembangan spiritual versi persantren, telah menghasilkan alumni-alumni yang berakhlak mulia, tahan bantingan dan tidak berperan sebagai pengemis pekerjaan, seperti alumni-alumni dari lembaga-lembaga pendidikan non-pesantren. Dari fakta ini saja, kita udah mendapatkan gambaran yang jelas tentang keterlibatan pesantren dalam proses pemberdayaan masyarakat, yang disadari atau tidak, telah membaca dampak yang positif bagi pembangunan nasional.

Contoh lain yang perlu dikemukakan disini, adalah kepedulian pesantren terhadap masalah “pendidikan” degan mengembangkan sistem pendidikan (berbasis) kerakyatan, pesantren ternyata mampu menampung kaum muda yang secara kuantitatif patut dibanggakan. Sebab, melalui sistem pendidikan kerakyatan ini siapapun dapat memasuki pendidikan di pesantren tanpa ada pembatasan atau kualifikasi tertentu. Semua calon santri, terlepas dari asal-usul kehidupan, keluarga dan ekonominya, diperlakukan sama sebagai manusia di hadapan Allah yang harus dihormati.

Sistem pendidikan kerakyatan tersebut, diakui atau tidak, dapat menumbuhkan solidaritas, kolektivisme dan egalitarianisme, sebagai bagian dari yang integral dari ajaran-ajaran agama yang memang harus diaktualisasikan dalam kehidupan kongkrit sehari-hari, sehingga, sistem pendidikan yang semacam itu – meminjam tesis Gus Dur – merupakan potensi demokratis pesantren, yang pengembangannya perlu ditangani secara intensif.

Dari itu terlihat dengan jelas tentang kepedulian pesantren dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini sekaligus membuktikan, bahwa pesantren mempunyai kontribusi yang besar dalam proses pembangunan agama, nusa dan bangsa.

Terlepas dari semua itu, pesantren tetap dituntut untuk berjuang lebih serius lagi, agar peran strategisnya sebagai “pembela” masyarakat bawah (kaum tertindas) dapat dipicu secara maksimal. Apalagi dalam kenyataan, pesantren masih terkesan lamban dalam mengantisipasi arus perubahan sosial, yang setelah mencabik-cabik kepribadian (personality) manusia. Karena itu, pesantren perlu membudayakan gerakan intelektual yang representatif, tradisi kepenulisan dan kerja-kerja yang professional.

Khatimah

Sebagai penutup dalam tulisan ini, penulisan perlu memberikan simpulan hasil pembahasan sebagai berikut. *Pertama*, bahwa arus globalisasi mempunyai dampak pada kehidupan manusia dalam segala line termasuk dalam pendidikan. Sehingga dunia pendidikan juga harus bijak menyikapi adanya globalisasi yang sudah tak terbendung lagi pada abad ini.

Kedua, pendidikan adalah sebagai media yang tepat dalam menghadapi globalisasi. Sehingga kebijakan-kebijakan pendidikan yang terkait dengan kemajuan pendidikan untuk mempersiapkan generasi bangsa yang siap masa depan memerlukan pengajaran (pendidikan) yang berkualitas sehingga melahirkan generasi bangsa yang baik.

Ketiga, adanya globalisasi tidak harus memberagus tradisi pendidikan Indonesia, tetapi tepatnya adalah mengambil yang baik untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta mempertahankan nilai-nilai dan tradisi lokal yang masih layak ditampilkan dalam pentas global. Pendidikan kita (Indonesia) tidak boleh terjebak arus global dengan pragmatisme dan komersialisasi pendidikan, tetapi mampu memfilter adanya tersebut.

Keempat, pendidikan pesantren tetap penting digalakkan sebagai alternative ditengah komersialisasi pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu agama juga hendaknya membuka diri dengan model pendidikan modern agar santrinya (*out put*-nya) bisa tampil sebagai bentuk respon terhadap dunia global dengan mempunyai dasar (*basic*) pendidikan agama yang dibarengi dengan pendidikan akhlaq, seperti pendidikan pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abd. *Pembaruan Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, cet. I, 2006).
- Abdul Munir Mulkhan, *Nalar Spiritual Pendidikan: Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002).
- Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).
- Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).
- Asrohah, Hanun. *Pelebagaan Pesantren; Asal-Usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004). Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993).
- Bawani, Imam. *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Darmaningtyas, *Pendidikan yang Memiskinkan Yogyakarta*: Galang Press, 2009).
- _____, *Pendidikan Rusak-Rusakan* (Yogyakarta: LKiS, 2007).
- Daulay, Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007).
- Departemen Agama RI. *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah; Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Jakarta: Depag RI, 2003.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1982).
- Fealy, Greeg. *Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKiS2007).
- H.A.R. Tilar, *Manifesto Pendidikan Nasional; Tinjauan dari Persepektif Postmodernisme dan Studi Kultural* (Jakarta: Kompas, 2005).
- Hafid Abbas, *Menegakkan Dimensi HAM dalam Mreposisi Arah Pendidikan Nasional dalam Mengurai Benang Kusut Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Halim, A. dkk.(ed.). *Manajemen Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Imam Branadib, *Pendidikan Perbandingan; Persekolahan dan Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Andi offset, 1987).
- Ismail SM (ed.), *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Khuluq, Lathiful. *Fajar Kebangunan NU: Biografi KH Hasyim Asy'ari*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 1999.

Ach. Syaiful A'la

- Ki Fudyartanta, *Membangun Kepribadian dan Watak Bangsa Indonesia yang Harmonis dan Integral* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Kompas, 11 Mei 2010.
- Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif* (Yogyakarta: LKiS, 2008).
- Maksun, *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Moh. Rofiq, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2009).
- Paulo Freire, dkk., *Menggugat Pendidikan; Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarkis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Rofiq A, dkk., *Pemberdayaan Pesantren; Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, cet. i, 2005).
- Rofiq, Ahmad. *NU/Pesantren dan Tradisi Pluralisme dalam Konteks Negara-Bangsa dalam Ahmad*
- Suaedy, *Pergulatan Pesantren dan Demokrasi* (Yogyakarta: LKiS, 2000).
- Suharto, Babun. *Dari Pesantren Untuk Umat: Reinventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi* (Surabaya: Imtiyas, 2011).
- Torsten Husen, *Masyarakat Belajar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- www.indonesia-tercinta.dampak-globalisasi (8 Oktober 2011).